



**LAPORAN KINERJA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T. atas segala rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Pelaporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan ini memberikan informasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Tahun 2024. Informasi tersebut berupa capaian Program, Kegiatan, maupun SubKegiatan dalam tahun 2024.

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 56 Tahun 2023 tentang “petunjuk pelaksanaan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta periode Tahun 2024.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun untuk mendapat evaluasi dari tim reviu. Besar harapan Kami hasil evaluasi yang membangun agar Pelaporan Kinerja Kami menjadi lebih baik di triwulan – triwulan berikutnya.

Purwakarta, Desember 2024

Kepala
Dinas Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Purwakarta



[Handwritten Signature]
H. YAYAT HIDAYAT, S.Sos.
NIP. 197002151997031009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja dalam kurun satu tahun yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan ini berisi tentang capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 39 Tahun 2023 Tentang "Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta" Sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta di atur oleh peraturan Bupati purwakarta Nomor 168 Tahun 2016.

Berdasarkan Peraturan tersebut di atas tugas pokok dan fungsi dinas pengendalian penduduk dan keluarga Berencana DPPKB kabupaten Purwakarta dapat diuraikan sebagai berikut :

Susunan organisasi:

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat Dinas , yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Perencanaan ,keuangan dan pelaporan
- c. Kepala Bidang Pengendalian penduduk
 - Jabatan Fungsional
- d. Kepala Bidang Keluarga Berencana ,terdiri dari
 - Jabatan Fungsional
- e. Kepala Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga
- f. Kepala UPTD Wilayah I,II,III terdiri dari
 - Subbag Tata Usaha

1.3. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Dalam usaha memenuhi Target kinerja Tahun 2024, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dihadapkan pada

beberapa permasalahan utama. Salah satu akar permasalahan utama Dppkb adalah sistem anggaran yang memiliki banyak kendala untuk pengajuan anggaran dan terjadi keterlambatan pencairan anggaran mengakibatkan keterlambatan kegiatan pelayanan pada Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .

yang minim. Berikut adalah tabel Pagu anggaran sebelum dan sesudah perubahan Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana :

N	KODE SUBKEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU PERUBAHAN	BESARAN PENGURANGAN PAGU
1	2	3	4	5	6
1	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	519.803.016	409.403.016	110.400.000
2	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.585.700	109.592.462	2.993.238
3	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130.619.989	88.619.989	42.000.000
4	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176.220.000	126.220.000	50.000.000
5	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.570.904.864	6.012.904.864	558.000.000
6	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana	254.000.000	204.000.000	50.000.000
7	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	50.000.000	50.000.000	0
8	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	373.000.000	273.000.000	100.000.000
9	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	250.000.000	200.000.000	50.000.000
10	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	155.000.000	62.500.000	92.500.000

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Ringkasan/ Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta merupakan dokumen yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang terintegrasi dengan potensi kekayaan sumber daya alam Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

Penetapan jangka waktu 3 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan /kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum OPD, sehingga Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dengan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun 2024.

2.2. **Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder. Pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Purwakarta adalah :

"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"

Pernyataan visi tersebut dilandasi pada nilai-nilai yang melekat di dalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Purwakarta yaitu gotong royong dan kebersamaan. Masyarakat yang mandiri diidentifikasi sebagai masyarakat yang mampu mengelola kehidupannya sendiri dan mempunyai kemampuan untuk berperan dalam pembangunan, namun demikian keterbatasan-keterbatasan yang lazim ditemukan pada masyarakat pedesaan seperti rendahnya pendidikan, rendahnya pendapatan yang menyebabkan rendahnya taraf hidup, membatasi kemampuan masyarakat untuk berbuat lebih, utamanya untuk berperan serta aktif dalam pembangunan di wilayahnya. Untuk itu diperlukan usaha yang sistematis untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat agar lebih mampu berperan aktif dalam pembangunan di wilayahnya, selain itu perlu juga peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksana roda pemerintahan di desa karena pemerintah desa berperan sebagai koordinator dalam usaha pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Misi yang ditetapkan Kabupaten Purwakarta untuk mencapai Visi dan tentunya telah disesuaikan dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki disesuaikan dengan Misi 1 (satu) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta yakni :

“ Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup”

Tujuan dan sasaran adalah penjabaran dari misi organisasi yang akan dicapai tiga tahun ke depan, bersifat lebih realistis dan terukur. Tujuan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta sesuai dengan misinya adalah :

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel

Sedangkan sasarannya adalah :

1. Meningkatkan frekuensi pelayanan sesuai standar pelayanan minimal”
2. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2.3. Kebijakan Program

Untuk mewujudkan visi serta misinya serta secara khusus untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai beberapa kebijakan yang tentunya dengan mempertimbangkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana yaitu :

1. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB,
2. Menerapkan rencana pengendalian penduduk
3. Meningkatkan pelayanan dan akseptor KB
4. Peningkatan pembangunan keluarga:
5. Mendorong dan memperluas pembentukan kampung KB disemua wilayah
6. Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan ketahanan keluarga sehat sejahtera
 - a. Program penunjang urusan pemerintahan daerahkabupaten/kota
 - b. Program pengendalian penduduk
 - c. Program pembinaan keluarga berencana
 - d. Program pembangunan ketahanan keluarga

Program-program yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarag Berencana Kabupaten Purwakarta ini adalah program yang dianggap strategis, mempunyai dampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Satker.

Kegiatan indikatif adalah kegiatan riil yang dilaksanakan oleh tiap satker sebagai langkah teknis untuk mencapai tujuan serta sasaran, kegiatan - kegiatan ini disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi serta wewenang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dan merupakan sub dari program-program yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarag Berencana. Berikut adalah daftar Kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2024 :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah ;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ;

Program Pengendalian Penduduk

- a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
- b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Program Pembinaan Keluarga Berencana

- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
- b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
- c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota
- d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

Program Pembangunan Ketahanan Keluarga

- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Kegiatan – kegiatan tersebut dijabarkan dalam beberapa sub kegiatan berikut ini :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ;
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- d. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- f. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ;
- h. Penyediaan peralatan rumah tangga;
- i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- j. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;
- k. Fasilitas Kunjungan Tamu
- l. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- m. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- n. Penyediaan Jasa Surat menyurat
- o. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik;
- p. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- q. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- r. Penyediaan Jasa pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- s. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- t. Pemeliharaan /Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program Pengendalian Penduduk

- a. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten
- b. Pelaksanaan Saresehat Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
- c. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
- d. Penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga
- e. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan sistem informasi

Keluarga\

- f. Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

Program Pembinaan Keluarag Berencana

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Prpgram KKBPK sesuai kearifan Budaya Lokal
- b. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
- c. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
- d. Pembinaan IMP dan Program KKBPK DI Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
- e. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga Penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
- f. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- g. Pengendalian pendistribusian Alat dan Obat kontrasepsi dan Sarana penunjang Pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya
- h. Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang MKJP
- i. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
- j. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
- k. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
- l. Penguatan Peran serta Oraginasasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB
- m. Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB

Program Pembangunan ketahanan keluarga

- a. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- b. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (NKN, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- c. Penyediaan biaya operasioanal bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- d. Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)
- e. Pelaksnaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan (BKB,BKR,BKL, PPPKS PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah. Perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarag Berencana adalah rencana kinerja yang disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana berikut :

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YAYAT HIDAYAT**

Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **BENNI IRWAN**

Jabatan : Pj.Bupati Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama,selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2024

Pihak Kedua


BENNI IRWAN

Pihak Pertama


YAYAT HIDAYAT

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAEAH KABUPATEN /KOTA	7.710.514.956	APBD
2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	9.498.700.000	APBD DAN DAK
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	500.000.000	APBD DAN DAK
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.848.800.000	APBD DAN DAK
	JUMLAH ANGGARAN	23.558.014.956	

Pihak Kedua


BENNI IRWAN

Purwakarta, Januari 2024

Pihak Pertama


YAYAT HIDAYAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,38	
II	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Capaian Sakip Perangkat Daerah	A	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	

Pihak Kedua


BENNI IRWAN

Pihak Pertama


YAYAT HIDAYAT

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program, Kegiatan, maupun Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

1. Capaian indikator antara target dengan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama(IKU)	Kinerja 2024				Sumber data
			Target	Realisasi	capaian	kategori	
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara aan Pemerintahan Daerah	Capaian Sakip Perangkat Daerah	A	A	A	Sangat Tinngi	
		Indek Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Tinggi	
2.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,35%	1,35%	100%	Sangat Tinngi	
		Meningkatkan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat Sejahtera	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,33%	2,33%	100%	Sangat Tinngi
		Persentase Perangkat Dacrah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100%	100%	100%	Sangat Tinngi	
		Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,33%	2,33%	100%	Sangat Tinngi	
		Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE	100%	100%	100%	Sangat Tinngi	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern	70%	74%	94,59%	Sangat Tinngi	

	Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)					
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8.00%	5.52%	1.45%	Sangat Tinggi	
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan				Sangat Tinggi	
	aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	100%	100%	100%		
	Ratio Akseptor KB	75,49%	74,37%	101,51%	Sangat Tinggi	
	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	70%	74,4%	94,09%	Sangat Tinggi	
	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	24,4%	24,4%	100%	Sangat Tinggi	
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	8%	5.52%	1.45%	Sangat Tinggi	
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	25,01%	14,42%	17,34%	Sangat Tinggi	
	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	10,43%	5,52%	18,89%	Sangat Tinggi	
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	95%	65,80%	69,26%	Sangat Tinggi	
	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	65%	10,29%	63,16%	Sangat Tinggi	
	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	11,30%	33,43%	29,58%	Sangat Tinggi	
	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	30,01%	18,88%	15,89%	Sangat Tinggi	
	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	535,30%	547,058%	97,85%	Sangat Tinggi	
	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	
	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	30%	30%	100%	Sangat Tinggi	
	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	1;1	1;1	100%	Sangat Tinggi	
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	
	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	127,98%	127,98%	100%	Sangat Tinggi	
	Persentase pembinaan Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50%	50%	100%	Sangat Tinggi	
	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	
	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	0	0	0	Sangat rendah	
	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan					

		keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	
		Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	60%	60%	100%	Sangat Tinggi	
		Rata-rata usia kawin pertama wanita	19,1%	19,1%	100%	Sangat Tinggi	

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024. Berikut adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Tahun 2023 dengan Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 20223		Tahun 2024		Keterangan
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
3	4	5	6	7	8
Capaian Sakip Perangkat Daerah	A	A	A	A	
Indek Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1.69%	1.69%	1,35%	1,35%	
TFR (Angka Kelahiran Total)	2.35%	2.35%	2,33%	2,33%	
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100%	100%	100%	100%	
Rata-rata jumlah anak per keluarga	2.35%	2,35%	2,33%	2,33%	
Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE	100	100	100%	100%	
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	73.3	73.3	70%	74%	
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	13.1	13.1	8.00%	5.52%	
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	100%	100%	100%	100%	
Ratio Akseptor KB	76.00%	76.00%	75,49%	74.37%	
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	73.3%	73.3%	70%	74.4%	
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	25.7%	25.7%	24,4%	24,4%	
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	13.1%	13.1%	8%	5.52%	
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	19.8	19.8	25,01%	14.42%	
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	13.1	13.1	10,43%	5.52%	
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	100	100	95%	65.80%	
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	89.17	89.17	65%	10.29%	
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	80.18%	80.18%	11,30%	33.43%	

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	23.53%	23.53%	30,01%	18.88%	
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	100%	100%	535,30%	547.058%	
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100%	100%	100%	100%	
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	81.4%	81.4%	30%	30%	
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	1:1	1:1	1:1	1:1	
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	42.52%	42.52%	127,98%	127,98%	
Persentase pembinaan Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	40%	40%	50%	50%	
Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100	100	100%	100%	
Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	0	0	0	0	
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100	100	100%	100%	
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	30.32	30.32	60%	60%	
Rata-rata usia kawin pertama wanita	20.1	20.1	19,1%	19,1%	

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI KINERJA 2024	TARGET AKHIR (RPD 2026)	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian Sakip Perangkat Daerah	A	A	A
2	Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik
3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,35%	1,37%	98.54%
4	Meningkatkan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat Sejahtera	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,33%	2,50%	93.2%
5		Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk	100%	100%	100%

	Pengendalian Penduduk			
6	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,33%	2,50%	93,2%
7	Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE	100%	100%	100%
8	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	74,00%	99,00%	74,74
9	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	5,52%	5,52%	5,52%
10	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	100%	100%	100%
11	Ratio Akseptor KB	74,37%	76,00%	97,85%
12	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	74,4%	76,00%	97,89%
13	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	24,4%	26,00%	106,55%
14	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	5,52%	5,52%	5,52%
15	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	14,42%	30,00%	48,06%
16	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	5,52%	5,52%	5,52%
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	65,80%	70,00%	94,00%
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	10,29%	11,00%	93,54%
19	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	33,43%	40,00%	83,57%
20	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	18,88%	20,00%	94,4%
21	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	547,058%	547,058%	100%
22	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100%	100%	100%
23	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	30,00%	30,05%	99,83%
24	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	1;1,6	1:1	1:1
25	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi	100%	100%	100%

		untuk memenuhi permintaan masyarakat			
26		Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	127,98%	127,98%	100%
27		Persentase pembinaan Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50,00%	60,00%	83,33%
28		Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100%	100%	100%
29		Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	0	0	0
30		Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100%	100%	100%
31		Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	60,00%	70,00%	85,71%
32		Rata-rata usia kawin pertama wanita	19,1%	20,00%	95,5%

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan Realisasi kinerja Dinas masih belum sesuai dengan target. Meskipun realisasi kinerja setiap tahun mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut masih di bawah target. Hal ini disebabkan semakin tingginya standar pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat atas berbagai pelayanan yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana. Kami akan selalu berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dari ketepatan waktu selesainya pelayanan perlu mendapat perhatian agar kualitas pelayanan semakin meningkat.

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian Sakip Perangkat Daerah	A	A	A	Dengan keberhasilan tercapainya indikator Capaian Sakip masih bertahan di gre A dengan akumulasi nilai 80,10 ada penurunan dari tahun sebelumnya di karenakan ada perubahan pemeriksaan dari inspektorat kabupaten Purwakarta	Dengan Melakukan Koordinasi dengan para pemeriksa atau pendamping
2		Indek Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik		

3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,35%	1,35%	100%	Ketercapaian target pada LPPP langsung di ukur oleh BKKBN Provinsi Jawa Barat/ namun tidak ada kegagalan dalam indikator tersebut karena terealisasi dengan baik pada tahun 2024	Mengevaluasi Setiap kegiatan
4	Meningkatkan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat Sejahtera	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,33%	2,33%	100%	Pada Indikator tersebut diukur dengan keberhasilan dari pelayanan yang di lakukan oleh DPPKB namun secara perhitungan di lakukan oleh BKKBN namun tidak ada kegagalan dalam indikator tersebut karena terealisasi dengan baik pada tahun 2024	Mengevaluasi Setiap kegiatan
5		Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100%	100%	100%	Dengan Melakukan Kerjasama dan mengadakan rapat secara berkala pertriwulan/ namun tidak ada kegagalan dalam indikator tersebut karena terealisasi dengan baik pada tahun 2024	Mengevaluasi Setiap kegiatan
6		Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,33%	2,33%	2,33%	Pada Indikator tersebut diukur dengan keberhasilan dari pelayanan yang di lakukan oleh DPPKB namun secara perhitungan di lakukan oleh BKKBN namun tidak ada kegagalan dalam indikator tersebut karena terealisasi dengan baik pada tahun 2024	Mengevaluasi Setiap kegiatan
7		Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE	100%	100%	100%	Dengan Melakukan Kerjasama dan mengadakan rapat secara berkala pertriwulan/ namun tidak ada kegagalan dalam indikator tersebut karena terealisasi dengan baik pada tahun 2024	Mengevaluasi Setiap kegiatan
8		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	70%	74%	70%	Dengan Memonitoring setiap kegiatan dan mengevaluasi sehabis kegiatan agar memiliki bahan evaluasi untuk kedepanya/ namun ada kendala dalam pelayanan seperti lokasi SDM masyarakat yang kurang memadai dan faktor petugas lini lapangan yang kurang cukup	Mengevaluasi Setiap kegiatan
9		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,00%	5,52%	8,00%	Dengan Menekan angka dropout pada Peserta dengan melakukan KIE KB /namun ada kegagalan yang terjadi di lapangan yaitu yang ingin anak segera.	Mengevaluasi Setiap kegiatan
10		Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	100%	100%	100%	Dengan Melakukan Kerjasama dan mengadakan rapat secara berkala pertriwulan/ namun tidak ada kegagalan dalam indikator tersebut karena terealisasi dengan baik pada tahun 2024	Mengevaluasi Setiap kegiatan
11		Ratio Akseptor KB	75,49%	74,37%	75,49%		Mengevaluasi Setiap kegiatan
12		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 -				Dengan Memonitoring setiap kegiatan dan mengevaluasi sehabis kegiatan agar memiliki	Mengevaluasi Setiap kegiatan

		49	70%	74.4%	70%	bahan evaluasi untuk kedepanya/ namun ada kendala dalam pelayanan seperti lokasi SDM masyarakat yang kurang memadai dan faktor petugas lini lapangan yang kurang cukup	
13		Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	24,4%	24,4%	24,4%	Dengan Keberhasilan pada Indikator Tersebut dengan meningkatkan pembinaan pada Petugas Lini lapangan yang terus melakukan pendampingan dengan cara dorong rumah ke rumah	Mengevaluasi Setiap kegiatan
14		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	8%	5.52%	8%	Dengan Menekan angka dropout pada Peserta dengan melakukan KIE KB /namun ada kegagalan yang terjadi di lapangan yaitu yang ingin anak segera.	Mengevaluasi Setiap kegiatan
15		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	25,01%	14,42%	25,01%	Dengan Memonitoring setiap kegiatan dan mengevaluasi sehabis kegiatan agar memiliki bahan evaluasi untuk kedepanya/ namun ada kendala dalam pelayanan seperti lokasi SDM masyarakat yang kurang memadai dan faktor petugas lini lapangan yang kurang cukup	Mengevaluasi Setiap kegiatan
16		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	10,43%	5.52%	10,43%	Dengan melakukan kegiatan monitoring pertriwulan kepada kelompok/ kekurangan petugas secara kualitas dan kuantitas	Mengevaluasi Setiap kegiatan
17		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	95%	65.80%	95%	Dengan melakukan kegiatan monitoring pertriwulan kepada kelompok/ kekurangan petugas secara kualitas dan kuantitas	Mengevaluasi Setiap kegiatan
18		Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	65%	10.29%	65%	Dengan melakukan kegiatan monitoring pertriwulan kepada kelompok/ kekurangan petugas secara kualitas dan kuantitas	Mengevaluasi Setiap kegiatan
19		Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	11,30%	33.43%	29,58%	Dengan Memonitoring setiap kegiatan dan mengevaluasi sehabis kegiatan agar memiliki bahan evaluasi untuk kedepanya/ namun ada kendala dalam pelayanan seperti lokasi SDM masyarakat yang kurang memadai dan faktor petugas lini lapangan yang kurang cukup	Mengevaluasi Setiap kegiatan
20		Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	30,01%	18.88%	15,89%	Dengan Memonitoring setiap kegiatan dan mengevaluasi sehabis kegiatan agar memiliki bahan evaluasi untuk kedepanya/ namun ada kendala dalam pelayanan seperti lokasi SDM masyarakat yang kurang memadai dan faktor petugas lini lapangan yang kurang cukup	Mengevaluasi Setiap kegiatan

21		Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	535,30%	547.058%	97.85%	Dengan melakukan kegiatan inovasi seperti genre go to school yang di lakukan pertriwulanan,namun kendala ada pada anggran yang kurang memadi	Mengevaluasi Setiap kegiatan
22		Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100%	100%	100%	Keberhasilan pada Indikator tersebut di lakukan dengan pembinaan kepada petugas lini lapangan yaitu PKB dan PLKB namu kendala yang di hadapi adalah kekurangan anggrana pada bidang Pembinaan Keluarag Berencana	Mengevaluasi Setiap kegiatan
23		Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	30%	30%	100%	Dengan Memonitoring setiap kegiatan dan mengevaluasi sehabis kegiatan agar memiliki bahan evaluasi untuk kedepanya/ namun ada kendala dalam pelayanan sperti lokasi SDM masyarakat yang kurang memadai dan faktor petugas lini lapangan yang kurang cukup	Mengevaluasi Setiap kegiatan
24		Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	1;1	1;1	100%	Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pelyanan KB membutuhkan petugas lini lapangan namun pada dpkkb masih kekurangan petugas lini lapangan yang seharusnya perbandingannya satu desa satu petugas namun sampai saat ini belum memenuhi kouta desa yang ada di kabupaten Purwakarta	Mengevaluasi Setiap kegiatan
25		Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	100%	100%	Dengan melakoordinasi dengan fakes yang didistribusi oleh dpkkb dterkait stock alkon yang tersedia.	Mengevaluasi Setiap kegiatan
26		Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	127,98%	127,98%	100%	Dengan melakukan kerjasama tambahan dengan seluruh fakes yang ada di kabupaten Purwakarta agar memiliki kemudahan masyarakat unutt mengikuti pelayanan	Mengevaluasi Setiap kegiatan
27		Persentase pembinaan Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50%	50%	100%	Dengan Memonitoring setiap kegiatan dan mengevaluasi sehabis kegiatan agar memiliki bahan evaluasi untuk kedepanya/ namun ada kendala dalam pelayanan sperti lokasi SDM masyarakat yang kurang memadai dan faktor petugas lini lapangan yang kurang cukup	Mengevaluasi Setiap kegiatan
28		Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100%	100%	100%	Dengan Memonitoring setiap kegiatan dan mengevaluasi sehabis kegiatan agar memiliki bahan evaluasi untuk kedepanya/ namun ada kendala dalam pelayanan sperti lokasi SDM masyarakat yang kurang memadai dan	Mengevaluasi Setiap kegiatan

						faktor petugas lini lapangan yang kurang cukup	
29		Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	0	0	0	Indikator tersebut tidak bisa dilakukan namun pada penyusunan RPJMD 2025-2029 akan di hapuskan karena indikator tersebut lebih fokus pada Dinas Kesehatan	Mengevaluasi Setiap kegiatan
30		Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100%	100%	100%	Dengan Memonitoring setiap kegiatan dan mengevaluasi sehabis kegiatan agar memiliki bahan evaluasi untuk kedepannya/ namun ada kendala dalam pelayanan seperti lokasi SDM masyarakat yang kurang memadai dan faktor petugas lini lapangan yang kurang cukup	Mengevaluasi Setiap kegiatan
31		Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	60%	60%	100%	Dengan Memonitoring setiap kegiatan dan mengevaluasi sehabis kegiatan agar memiliki bahan evaluasi untuk kedepannya/ namun ada kendala dalam pelayanan seperti lokasi SDM masyarakat yang kurang memadai dan faktor petugas lini lapangan yang kurang cukup	Mengevaluasi Setiap kegiatan
32		Rata-rata usia kawin pertama wanita	19,1%	19,1%	100%	Keberhasilan pada usia kawin pertama wanitaini di lakukan secara kegiaian genre go to school yang memberikan materi ideal perkawinan pada remaja	Mengevaluasi Setiap kegiatan

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

untuk Tahun Anggaran 2024 pada tabel di bawah ini;

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian kinerja %	Penyerpan anggaran %	Tingkat Efesiensi%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap	Capaian Sakip Perangkat Daerah	A	89.36%	80.16%
2	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat	Baik		
3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	100%		
4	Meningkatkan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat Sejahtera	TFR (Angka Kelahiran Total)	100%	90.04%	36.27%
5		Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100%		
6		Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,33%		
7		Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE	100%		
8		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (ModernContraceptive PrevalenceRate/mCPR)	70%		

9	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8.00%		
10	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	100%		
11	Ratio Akseptor KB	75.49%		
12	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	70%		
13	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	24.4%		
14	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	8%		
15	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	25.01%		
16	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	10.43%		
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	95%		
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	65%		
19	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	29.58%		
20	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	15.89%		
21	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	97.85%		
22	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100%	96.89%	26.91%
23	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	100%		
24	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100%		
25	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%		
26	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100%		
27	Persentase pembinaan Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100%		
28	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100%		
29	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	0	97.34%	14.94%
30	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100%		
31	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	100%		
32	Rata-rata usia kawin pertama wanita	100%		

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam mendukung pelaksanaan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Kepala Dinas dengan Bupati Purwakarta.

Berikut adalah realisasi anggaran yang merupakan tanggung jawab dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mengelolanya secara transparan, efektif, dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Tabel realisasi Tahun 2024

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	SISA ANGGARAN (Rp.)
			JUMLAH (Rp.)	
1	2	3	4	5
	TOTAL			
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.540.048.231,00	6.738.401.043,00	801.647.188,00
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.798.200	29.135.400,00	8.662.800,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.346.600	9.337.600,00	9.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.461.800	9.332.000,00	129.800,00
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.989.800	Rp10.465.800,00	Rp8.524.000,00
II	Administrasi Keuangan Daerah	6.020.646.564	Rp5.448.599.524,00	Rp572.047.040,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.012.904.864	Rp5.440.949.324,00	Rp571.955.540,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.741.700	Rp7.650.200,00	Rp91.500,00
III	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	12.575.000	Rp12.570.000,00	Rp5.000,00
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.575.000	Rp12.570.000,00	Rp5.000,00
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	295.406.489	Rp200.474.500,00	Rp94.931.989,00

1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.335.000	Rp13.335.000,00	Rp0,00
2	Penyediaan peralatan rumah tangga	32.815.500	Rp6.397.000,00	Rp26.418.500,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.619.989	Rp87.439.500,00	Rp1.180.489,00
4	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	19.416.000	Rp19.416.000,00	Rp0,00
5	Fasilitas Kunjungan Tamu	15.000.000	Rp3.375.000,00	Rp11.625.000,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.220.000	Rp70.512.000,00	Rp55.708.000,00
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	261.192.000	Rp260.657.000,00	Rp535.000,00
1	Pengadaan Mebel	8.895.000	Rp8.850.000,00	Rp45.000,00
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	252.297.000	Rp251.807.000,00	Rp490.000,00
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	521.995.478	Rp445.990.356,00	Rp76.005.122,00
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	3.000.000	Rp3.000.000,00	Rp0,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	109.592.462	Rp48.752.360,00	Rp60.840.102,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	409.403.016	Rp394.237.996,00	Rp15.165.020,00
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	390.434.500	Rp340.974.263,00	Rp49.460.237,00
1	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	Rp47.855.000,00	Rp2.145.000,00
2	Penyediaan Jasa pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.000.000	Rp36.024.000,00	Rp31.976.000,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	245.024.500	Rp244.445.263,00	Rp579.237,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.410.000	Rp12.650.000,00	Rp14.760.000,00
B	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp366.000.000,00	Rp329.558.000,00	Rp36.442.000,00
VIII	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Rp145.000.000,00	Rp144.541.000,00	Rp459.000,00
1	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten	Rp25.000.000,00	Rp24.570.000,00	Rp430.000,00
2	Pelaksanaan Saresehat Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Rp62.342.000,00	Rp62.327.000,00	Rp15.000,00
3	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Rp57.658.000,00	Rp57.644.000,00	Rp14.000,00

IX	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp221.000.000,00	Rp185.017.000,00	Rp35.983.000,00
1	Penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Rp126.000.000,00	Rp125.978.000,00	Rp22.000,00
2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan sisystem informasi Keluarga	Rp60.000.000,00	Rp34.039.000,00	Rp25.961.000,00
3	Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Rp35.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp10.000.000,00
C	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp8.643.660.000,00	Rp8.374.473.685,00	Rp269.186.315,00
X	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp877.600.000,00	Rp857.893.187,00	Rp19.706.813,00
1	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Rp204.000.000,00	Rp185.406.925,00	Rp18.593.075,00
2	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Rp573.600.000,00	Rp572.936.512,00	Rp663.488,00
	Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp100.000.000,00	Rp99.549.750,00	Rp450.250,00
XI	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rp2.439.360.000,00	Rp2.431.562.500,00	Rp7.797.500,00
1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Rp300.000.000,00	Rp292.202.500,00	Rp7.797.500,00
2	Pembinaan IMP dan Program KKBPK DI Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Rp753.360.000,00	Rp753.360.000,00	Rp0,00
3	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Rp1.386.000.000,00	Rp1.386.000.000,00	Rp0,00
XII	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota	Rp4.101.950.000,00	Rp3.941.837.998,00	Rp160.112.002,00
1	Pengendalian pendistribusian Alat dan Obat kontrasepsi dan Sarana penunjang Pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Rp108.900.000,00	Rp108.900.000,00	Rp0,00
2	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka	Rp3.720.050.000,00	Rp3.567.956.998,00	Rp152.093.002,00

	panjang MKJP			
3	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
4	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Rp273.000.000,00	Rp264.981.000,00	Rp8.019.000,00
XIII	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rp1.224.750.000,00	Rp1.143.180.000,00	Rp81.570.000,00
1	Penguatan Peran serta Oraginasasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	Rp100.000.000,00	Rp57.680.000,00	Rp42.320.000,00
2	Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB	Rp1.124.750.000,00	Rp1.085.500.000,00	Rp39.250.000,00
D	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp5.620.900.000,00	Rp5.471.404.000,00	Rp149.496.000,00
XIV	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp5.338.400.000,00	Rp5.213.637.000,00	Rp124.763.000,00
1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp300.000.000,00	Rp234.900.000,00	Rp65.100.000,00
2	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (NKN, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp200.000.000,00	Rp140.337.000,00	Rp59.663.000,00
3	Penyediaan biaya operasioanal bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp4.838.400.000,00	Rp4.838.400.000,00	Rp0,00
XV	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp282.500.000,00	Rp257.767.000,00	Rp24.733.000,00
1	Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS PIK-R dan pemberdayaan ekonomi	Rp62.500.000,00	Rp42.400.000,00	Rp20.100.000,00

	keluarga/UPPKS			
2	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan (BKB,BKR,BKL, PPPKS PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Rp220.000.000,00	Rp215.367.000,00	Rp4.633.000,00

BAB IV PENUTUP

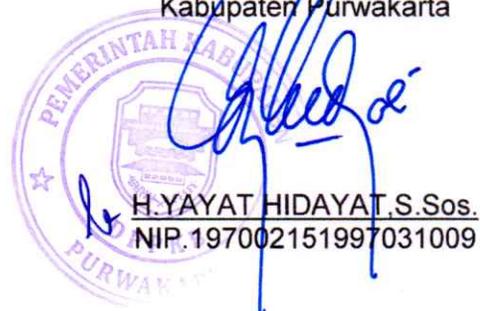
Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun Triwulan I,II,II dan IV 2024. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Sudah memenuhi target. Dari target sebesar 99,9, nilai yang diperoleh adalah sebesar 93,5 Meskipun realisasi kinerja setiap tahun mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut masih di bawah target. Hal ini disebabkan semakin tingginya standar pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat atas berbagai pelayanan yang ada di Dinas pengendalian penduduk dan Keluarag Berencana. Kami akan selalu berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dari hasil survey, ketepatan waktu selesainya pelayanan perlu mendapat perhatian agar kuliatas pelayanan semakin meningkat.

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, saran dan kritik selalu diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan kinerja pada waktu mendatang dan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Purwakarta, Desember 2024

Kepala
Dinas Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Purwakarta



H.YAYAT HIDAYAT, S.Sos.
NIP.197002151997031009